

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN (*WOMEN TRAFFICKING*)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Ari Wahyu Pambudi

NIM. E0006083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
*WOMEN TRAFFICKING***

Oleh

Ari Wahyu Pambudi

NIM. E0006083

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Oktober 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Winarno Budyatmojo, S.H., M.S

NIP. 196005251987021002

Budi Setiyanto, S.H., M.H.

NIP. 195706101896011001

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
WOMEN TRAFFICKING****Oleh****Ari Wahyu Pambudi****NIM. E0006083****Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta****Pada:****Hari : Senin****Tanggal : 1 Nopember 2010****DEWAN PENGUJI**

1. SITI WARSINI, S.H., M.H :
NIP. 19470911198003002
Ketua
2. WINARNO BUDYATMOJO, S.H., M.S:
NIP. 196005251987021002
Sekretaris
3. BUDI SETIYANTO, S.H., M.H :
NIP. 19570610198901001
Anggota

Mengetahui
Dekan,

MOHAMMAD JAMIN, S.H., M.HUM.

NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Ari Wahyu Pambudi

NIM : E0006083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *WOMEN TRAFFICKING* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Oktober 2010

Yang membuat pernyataan

Ari Wahyu Pambudi

NIM.E0006083

ABSTRAK

Ari Wahyu Pambudi. E0006083. 2010. KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *WOMEN TRAFFICKING*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *women trafficking* di Indonesia. Selain itu meninjau kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam pengaturan perlindungan hukum tersebut terhadap korban *women trafficking*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan, mengenai gambaran atau pemaparan tentang perlindungan hukum terhadap korban *women trafficking*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku yang relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan *women trafficking*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*satute approach*) dengan prosedur pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diolah secara deduktif dan dianalisis secara kualitatif, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *women trafficking* di Indonesia serta kelemahan dan kelebihan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *women trafficking* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam pembahasan ditarik kesimpulan, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *women trafficking* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pengaturan mengenai korban *women trafficking* telah mengalami kemajuan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti sudah berorientasi kepada korban dan adanya bentuk tanggung jawab dari pelaku. Setelah dikaji ditemukan beberapa kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *women trafficking* yang diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk perbaikan pada peraturan perundang-undangan selanjutnya yang mengatur mengenai korban *women trafficking*.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban kejahatan, perdagangan perempuan

ABSTRACT

Ari Wahyu Pambudi. E0006083. 2010. A JURIDICAL STUDY ON LAW PROTECTION FOR THE VICTIM OF WOMEN TRAFFICKING. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out the law protection regulation for the victim of women trafficking in Indonesia. In addition, it also reviews the weakness and strength in the law protection regulation for the victim of women trafficking.

This study belongs to a normative law research that is prescriptive or applied in nature, concerning the description about the law protection for the victim of women trafficking. The data type employed was secondary one consisting of primary law material particularly the legislation and secondary law materials including the books relevant to the research relating to the woman trafficking. This research used a statute approach with library study as technique of collecting data in which the data was processed in deductive manner and analyzed qualitatively, so that finally it can be found that the law protection regulation for the victim of women trafficking in Indonesia as well as the weakness and strength of law protection regulation for the victim of women trafficking.

Considering the result of research included in the discussion, it can be concluded that there are several legislations governing the women trafficking: Act Number 7 of 1984, Act Number 26 of 2000, Presidential Decree Number 88 of 2002 and Act Number 21 of 2007. The regulation concerning the victim of women trafficking experiences progress since the enactment of Act Number 21 of 2007 about the Eradication of Human Trafficking Crime as oriented to the victim and the presence of responsibility form from the doer. After being studied, it can be found the weakness and strength of legislation governing the women trafficking that is expected to be the study material for the improvement in the future legislation regulating the victim of women trafficking.

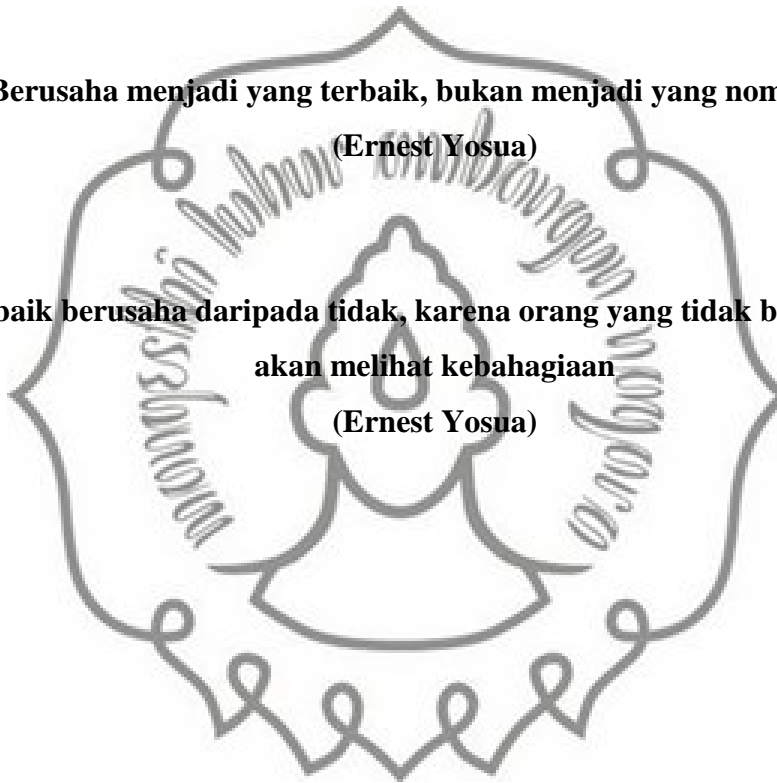
Keywords: law protection, criminal victim, woman trafficking.

MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat
(Winston Churchill)

Berusaha menjadi yang terbaik, bukan menjadi yang nomor satu
(Ernest Yosua)

Lebih baik berusaha daripada tidak, karena orang yang tidak berusaha tidak akan melihat kebahagiaan
(Ernest Yosua)



PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT atas semua berkah, rahmat dan anugerah yang selalu tercurah kepadaku sampai saat ini dan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan tauladan dalam kehidupanku.
- ❖ Ibu dan Bapak serta adik-adikku, Yogie Arya Saputra dan Riska Rosi Pratiwi, yang selalu memberikan kasih sayang dan kehangatan dalam keluarga, menjadi penyemangat dalam hidupku, serta atas semua nasehat, pembelajaran dan masukan yang tidak henti-hentinya mengalir demi kebaikan penulis.
- ❖ Buat Kakek dan Nenek serta keluarga besar yang tak hentinya memberikan doa dan semangat kepadaku, yang selalu memberikan kasih sayang dan nasihat kepadaku sehingga penulis merasa nyaman berada dalam lingkup keluarga besar.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini. Serta tidak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW (beliau adalah) setingginya makhluk yang dimuliakan dengan Al-qur'an sebagai Mu'jizat yang berlaku sepanjang masa.

Penulisan Hukum ini berjudul ” **KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN WOMEN TRAFFICKING** ” bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh derajat sarjana S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademika civitas hukum dan berbagai pihak yang membutuhkannya. Penulis sadar, penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya penulisan hukum ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. M. Syamsulhadi, Sp, Kj, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta .
3. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S dan Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku pembimbing Skripsi dan pembimbing rencana penelitian (proposal) yang

telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Ibu Adriana Grahani Firdausy, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum UNS.
5. *My Cemplex*, Nia Novianty, S.H makasih atas semua cinta, kasih sayang, pengertian, doa dan kesabaran, serta bantuannya. Semoga doa dan harapan kita yang indah di-amini oleh para malaikat dan disampaikan kepada Allah SWT, sehingga kita dapat mewujudkan doa dan harapan yang indah itu bersama-sama atas ijin dari Allah.
6. Teman-teman di Mootcourt Community (MCC) khusus untuk event PERS: Deasy, Nonie, Anis, Yaya, Raharjo, Qomaruzzaman, Adi “bedu“, Novrizal Ibnu, Lukman “manuk“, Budi, Ratna, Rere, Adi Nugraha, Cindy, Merlin, Orin, Citra, Bambang “bemby“, Tian yang telah kuanggap sebagai keluarga baruku. Terimakasih atas kesempatan, pengalaman, pelajaran dan kenangan terindah dalam masa-masa akhir kuliahku. Kalian luar biasa.
7. Agung “margera“, Reza, Wasiat Eko, Nilla, Haris, Lutvi, Hendro, terimakasih untuk kebersamaan dan kenangannya selama kuliah. Kalian tidak akan pernah terlupa.
8. Teman-teman angkatan 2006, terima kasih bisa menjadi bagian dari kalian selama penulis kuliah. Semoga kalian menjadi manusia yang luar biasa
9. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun material dalam Penulisan Hukum ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Kerangka Teori	12

1. Tinjauan Tentang Korban.....	12
a. Pengertian Korban	12
b. Tipologi korban	13
c. Hak-hak Korban.....	15
d. Kewajiban Korban	17
e. Syarat dan Tata Cara Perlindungan terhadap Korban .	18
2. Tinjauan Tentang Perdagangan Orang atau Trafficking ..	20
B. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Women Trafficking</i> Di Indonesia	29
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.....	29
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	30
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	42
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak	45
B. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Women Trafficking</i> Di Indonesia	46
1. Kelemahan	46
2. Kelebihan	53

BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, memunculkan kejahatan yang semakin kompleks, yang lebih sistematis dan berjejaring termasuk salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang yang lebih dikenal dengan *trafficking*. Perdagangan orang yang terjadi merupakan suatu hal yang sebenarnya telah ada pada masa dulu namun merupakan bentuk perbudakan yang baru dengan modus yang berbeda-beda pula. Kejahatan *trafficking* tersebut melintasi batas-batas geografis tidak hanya antar wilayah satu negara tetapi juga antar negara sehingga menimbulkan permasalahan internasional. Hal semacam ini membuat sulitnya penanganan atau pemberantasan terhadap kejahatan *trafficking*. Perkembangan ini harus diperhatikan oleh bangsa-bangsa agar dapat terus mengikuti dan mencegah serta menangani masalah perbudakan modern ini.

Perdagangan orang (*trafficking*) sebenarnya mempunyai makna lebih luas yang tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak saja. *Trafficking* dapat menimpa semua orang yang tidak dibatasi oleh jenis kelamin maupun usia. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan *trafficking*. Isu *trafficking* merupakan isu yang sensitif yang secara tidak langsung berhadapan dengan nilai-nilai budaya setempat serta isu diskriminasi yang sudah berakar cukup kuat sejak berabad-abad. Namun dalam penulisan ini lebih memfokuskan kepada *women trafficking* (perdagangan perempuan), yaitu perempuan dewasa. Faktor budaya patrilineal yang kemudian mengkondisikan perempuan dalam ketidakadilan gender baik itu bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe dan kekerasan (Erna Dyah Kusumawati, 2005:1459-1460).

Selain itu sebagai korban *women trafficking*, perempuan dewasa terkadang mempunyai andil terjadinya kejahatan tersebut, karena ada persetujuan dari korban itu sendiri dengan berbagai alasan salah satunya karena faktor ekonomi, tingginya angka kemiskinan membuat seseorang cepat tergiur akan suatu tawaran pekerjaan tanpa mempedulikan kebenaran dan akibatnya setelah itu.

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), antara dua dan empat juta perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun. Pada tahun 2000, di seluruh dunia diperkirakan antara 700.000 (tujuh ratus ribu) sampai 2 juta kaum perempuan dan anak-anak merupakan korban *trafficking*. Dari jumlah tersebut sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) sampai 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) diantaranya terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 2003, jumlah ini mengalami peningkatan seperti yang dilaporkan oleh *Bureau of Public Affairs, US Departement of SATE* yaitu bahwa tiap tahun sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) sampai 900.000 (Sembilan ratus ribu) manusia telah diperdagangkan dengan mengabaikan batas-batas internasional untuk tujuan memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Sangat sulit untuk mendapatkan angka jumlah korban secara pasti dalam hal ini (<http://forum.hukum-umm.info/index.php?topic=190.0>).

Kaum perempuan merupakan korban yang terbesar dari perdagangan haram ini. Pergerakan manusia menjangkau perbatasan secara ilegal dan tersembunyi ialah fenomena global yang serius. Perdagangan orang bukan hanya kejahatan transnasional, tetapi juga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan perbudakan bentuk baru (<http://forum.hukum-umm.info/index.php?topic=190.0>). Perdagangan orang secara ilegal terutama para perempuan ini berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan. Di negara-negara Asia Tenggara para perempuan diperlakukan sewenang-wenang tanpa mempedulikan faktor manusiawi yang bersentuhan dengan harkat dan martabatnya. Para perempuan dibujuk, dipaksa dan diperdagangkan untuk industri seks dan dunia hiburan lainnya, terdapat juga yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pabrik dengan jam kerja tak terbatas dan upah minimum. Praktek-praktek semacam ini tergolong pelanggaran terhadap pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan dan penegakan manusia dan hukum (<http://forum.hukum-umm.info/index.php?topic=190.0>).

Walaupun tidak tersedia data statistik yang canggih tentang kasus-kasus perdagangan perempuan yang terjadi secara nasional, kejahatan ini telah menimpa

banyak perempuan Indonesia, khususnya mereka yang sedang mencari kerja. Sebagai gambaran, Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur Malaysia melaporkan telah menerima pengaduan 2.451 kasus pada tahun 2001, 2.155 kasus pada tahun 2002, 2.112 kasus pada tahun 2003, dan 2.158 kasus pada tahun 2004. Mayoritas besar korban dalam kasus ini adalah perempuan Indonesia (baik dewasa maupun anak-anak). Indonesia memiliki sekitar 200 ribu pekerja seks, satu juta pekerja rumah tangga, dan satu juta orang TKW (Rosenberg dalam Anis Hamim dan Fatimana Agustinanto, 2006:261).

Persoalan *women trafficking* kadang masih dipandang sebelah mata oleh aparat penegak hukum, aparat pemerintah dan anggota masyarakat hal tersebut tercermin dari penggunaan standar moralitas yang biasa memandang kasus *women trafficking*. Implikasi dari kondisi tersebut mengerucut pada ketidakadilan dan pengabaian hak-hak korban *women trafficking* selain itu juga berimplikasi terjadinya kriminalisasi terhadap korban, sehingga kondisi yang dialami korban adalah menjadi “pelaku” atas penderitaan yang dialaminya. Untuk menjamin kedudukan korban maka diabaikannya unsur persetujuan/*conset* dari korban *women trafficking* (R.Valentina Sagala, 2006:294).

Angka persentase yang sangat berarti telah dimunculkan melalui berbagai survei, sebagaimana dibahas dan diketahui bahwa masalah *trafficking* merupakan suatu isu internasional yang telah menyita perhatian publik baik domestik maupun internasional, karena korban kejahatan ini telah banyak yang diketahui berjatuhannya, dan dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Pada konteks nasional, persoalan *trafficking* di Indonesia sudah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18122/3/Chapter%20II.pdf>).

Salah satu upaya untuk mengakomodasi perlindungan terhadap korban *women trafficking* adalah perlu dibuatnya aturan hukum untuk menjamin kedudukan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Sebagai kejahatan transnasional maka dibutuhkan aturan yang berskala internasional maupun nasional yang dapat mengatur mengenai kejahatan *women trafficking* ini. Di Indonesia sendiri pengaturan yang mengacu mengenai korban *women trafficking* dapat ditemui beberapa aturan

hukum, dari aturan hukum yang bersifat umum sampai aturan yang bersifat khusus yang lebih spesifik mengatur mengenai *women trafficking* yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*".

Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul **"KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (*WOMEN TRAFFICKING*)"**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah kelemahan dan kelebihan dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Indonesia .

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk dapat meraih gelar Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan Penulis di bidang Hukum Pidana khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*).

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan sangat berguna bila hasilnya memberikan manfaat, tidak hanya bagi Penulis, tetapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*).

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistemis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi Penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:41).

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny Ibrahim, 2006:26). Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006: 28).

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).

Penelitian normatif mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian sejarah hukum,
- e. Penelitian perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2006:51).

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis cenderung kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian untuk menemukan asas-asas hukum yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/). Dimana hukum positif tertulisnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban perdagangan perempuan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat dari ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif atau terapan, maksudnya bahwa ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 22)

Oleh sebab itu, dalam laporan penelitian ini Penulis memberikan gambaran atau pemaparan tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Pendekatan yang dilakukan Penulis adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Dalam hal ini menggunakan pendekatan terhadap aturan hukum meliputi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

4. Jenis Data

Jenis data yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 - 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - 4) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini (Johnny Ibrahim, 2006: 393).

Setelah isu hukum ditetapkan, Penulis melakukan penelusuran mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Dalam hal penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan isu tersebut yaitu aturan hukum di Indonesia yang meliputi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Serta Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

6. Pengolahan Hasil dan Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006: 393). Setelah diperoleh data yang akan diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorisasikan, kemudian proses pengorganisasian dan pengelompokkan data (Lexi J.Moleong, 2009:280-281). Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban women trafficking di Indonesia serta kelemahan dan kelebihan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban women trafficking tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini meliputi :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai tinjauan tentang korban dan perdagangan orang atau *trafficking*.

BAB III : Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *women trafficking* di Indonesia dan kelemahan dan kelebihan pengaturan *women trafficking* di Indonesia.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat Penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

Daftar Pustaka

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Korban

a Pengertian Korban

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Arief Gosita
Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- 2) Muladi
Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:46-47).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

b Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri (Rena Yulia, 2009:52).

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi (Schafer dalam Suryono Ekotama. Harum Pudjianto dan Wiratama, 2001:176-177).

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi (Rena Yulia, 2009:54).

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan.
Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban.

Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku.

Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku (Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007:50-51)

c Hak-hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Berkenaan dengan hak-hak yang dimiliki korban dan keluarganya, perlu dibentuk suatu lembaga untuk menanganinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan, artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindakan pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-haknya yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Namun demikian, banyak juga korban atau keluarganya yang menggunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007:53).

Didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- k. Mendapat nasihat dan/atau
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menurut Rena Yulia beberapa bentuk perlindungan terhadap korban sebagai pemenuhan hak-hak korban, yaitu:

a. Ganti Rugi

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. Tujuan dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolok ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

b. Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan (Rena Yulia, 2009:59-61).

d Kewajiban Korban

Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan antara lain:

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.
- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.

- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
- g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 54-55).

e Syarat dan Tata Cara Perlindungan terhadap Korban

Secara umum perlindungan terhadap korban dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas dasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, syarat pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan/ atau korban meliputi;

- 1) sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- 2) tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- 3) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- 4) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dalam pemberian perlindungan dan bantuan harus ada perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban dan hanya untuk tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Termasuk didalamnya tindak pidana *women trafficking*.

Kemudian tata cara pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban adalah sebagai berikut:

1) Tata cara pemberian perlindungan

Mengenai tata cara pemberian perlindungan diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a) Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK dan menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban yang memuat: kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama ia berada dalam perlindungan LPSK, kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK, dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK;
- b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan saksi dan/korban;
- c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

2) Tata cara pemberian bantuan

Bantuan yang dimaksud adalah bantuan dalam hal bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6). Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK (Pasal 33). Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut (Pasal 35).

2. Tinjauan Tentang Perdagangan Orang atau *Trafficking*

Perdagangan orang atau lebih dikenal dengan *trafficking* biasanya lebih dikaitkan terhadap perdagangan perempuan dan anak. Padahal sebenarnya *trafficking* mempunyai makna yang lebih luas yang tidak hanya bisa terjadi pada perempuan dan anak namun juga terhadap laki-laki. *Trafficking* dalam area perdagangan perempuan dan anak merupakan terjemahan atas *trafficking in person especially women and children*. Konsep *trafficking* lebih ditujukan pada anak dan perempuan hal ini tidak terlepas dari hak asasi manusia (HAM) yang memposisikan perempuan dan anak dalam bentuk instrumen perlindungan (Erna Dyah Kusumawati, 2005:1460).

Pemahaman mengenai *trafficking* terutama perdagangan perempuan (*women trafficking*) dapat kita temui dalam berbagai ketentuan, yaitu

- a Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantasan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. (pasal 6)

- b Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengenai *Trafficking* secara tersirat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang ini. Pasal 9 menyatakan:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakkan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakkan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Dari isi Pasal 9 Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dikategorikan sebagai kejahatan *women trafficking* adalah pada huruf c dan g.

- c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang ini lebih spesifik mengatur mengenai *trafficking*.

Definisi *trafficking* terdapat dalam pasal 1, yang menyatakan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- d Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Pada lampiran Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Bab I huruf c, menjelaskan bahwa pengertian dari trafiking perempuan dan anak dalam RAN ini adalah

Segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Merujuk dari pengertian yang termuat dalam RAN tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan (trafiking) perempuan adalah Segala tindakan pelaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual, buruh migran legal maupun ilegal, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi,

pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Pendefinisian mengenai *trafficking* yang diutarakan diatas memberikan gambaran betapa *trafficking* merupakan kejahatan yang kompleks dan mempunyai kekhasan dilakukan secara sistematis dan berjejaringan.

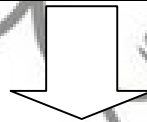
Disamping itu melintasi batas-batas geografis tidak hanya antar wilayah dalam suatu negara tetapi bahkan transnasional. Pada dasarnya pembagian wilayah kerja terjadinya *trafficking* sesuai dengan protokol PBB dibagi dalam 3 (tiga) daerah (bisa meliputi: kabupaten, propinsi maupun negara) yaitu: daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan. Daerah asal adalah daerah tempat dimana korban *trafficking* berasal. Daerah asal ini untuk wilayah Indonesia berada pada daerah kantong kemiskinan. Sedangkan daerah transit merupakan tempat sementara atau penampungan sementara para korban *trafficking* sebelum diberangkatkan ke daerah tujuan. Daerah transit biasanya mempunyai akses transportasi yang mudah dicapai. Di Indonesia sendiri ada beberapa titik sebagai daerah transit korban *trafficking* sebelum diberangkatkan ke luar negeri seperti : Bandung, Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, dan Nunukan. Sedangkan daerah tujuan adalah daerah akhir korban tersebut di perdagangan (Erna Dyah Kusumawati, 2005:1463).

Dari aturan-aturan tersebut tidak ditemukan pengaturan mengenai perdagangan perempuan secara jelas dan spesifik. Mengenai perdagangan perempuan hanya ditemukan secara implisit dalam pengertian *trafficking* secara umum, karena perdagangan perempuan merupakan bagian dari *trafficking* dengan korbannya dikhususkan pada perempuan, terutama perempuan dewasa.

Untuk lebih memahami konsep perdagangan orang, maka dalam Draft Pendampingan Korban Perdagangan Manusia dalam Proses Hukum di Indonesia (sebuah panduan untuk pendamping korban) yang diterbitkan oleh ACILS dan ICMC, Jakarta, telah dibuat bagan sebagaimana tersebut dibawah ini

Tabel 1
Konsep Perdagangan Manusia

Proses	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
Atau		Atau		Atau
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Atau		Atau		Atau
Pemindahan	D	Penculikan	D	Kekerasan/eksploitasi
Atau	A	Atau	A	seksual
Penampungan	N	Penipuan	N	Atau
Atau		Atau		Kerja paksa
Penerimaan		Kecurangan		Atau
		Atau		Perbudakan/praktek-
		Penyalahgunaan		praktek serupa
		kekuasaan		



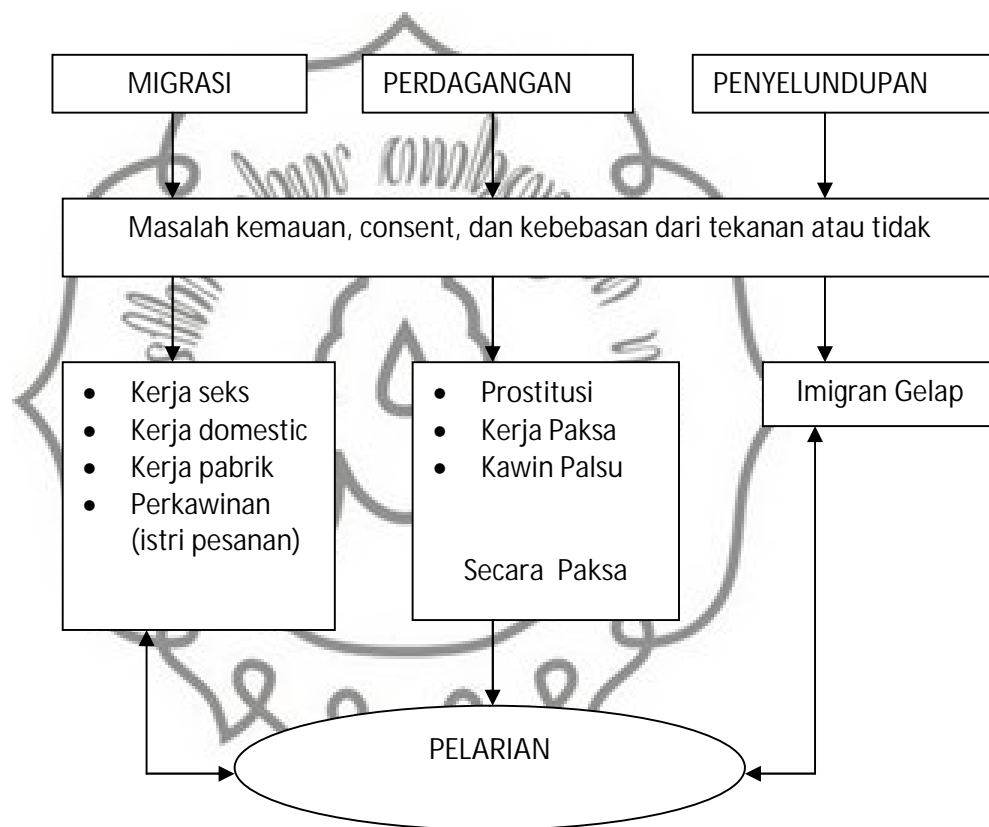
PERSETUJUAN KORBAN TIDAK RELEVAN JIKA SALAH SATU
CARA DIATAS SUDAH ADA

Sumber: Erna Dyah Kusumawati, 2005:1463

Tabel diatas dilihat dari tujuan perdagangan orang yang meliputi: prostitusi, pornografi, kekerasan/eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perbudakan/praktek-praktek serupa, memiliki kecenderungan bahwa objeknya adalah perempuan. Sehingga tabel diatas juga bisa menjadi konsep pedagang perempuan.

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya dalam perdagangan perempuan adalah perbedaan dengan migrasi dan penyelundupan. Selain definisi, hal

pembedaan tersebut berpengaruh besar terhadap aplikasi perdagangan perempuan dalam hukum nasional. Menurut GAATW dalam Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak. Acuan pembedaan antara migrasi, penyelundupan, dan perdagangan perempuan itu sendiri terletak pada sifat kemauan, proses pelaksanaan, dan eksploitasinya, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

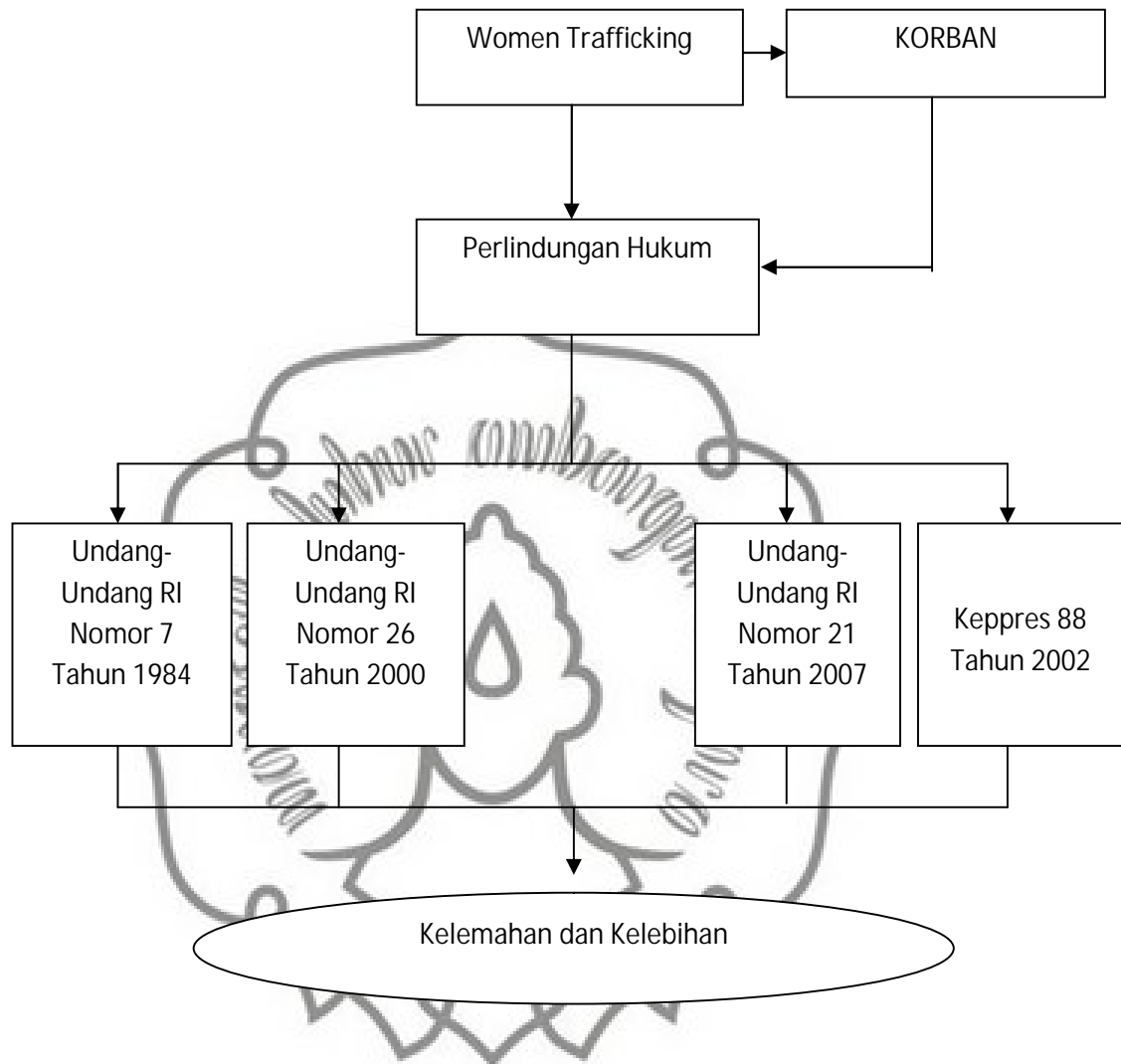


Bagan 1

Global Alliance Againsts Traffic in Women

Sumber: Erna Dyah Kusumawati, 2005:146

H. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.
Bagan Kerangka Berpikir

Keterangan:

Perdagangan orang (*trafficking*) terkhususkan perdagangan perempuan (*women trafficking*) mempunyai permasalahan yang sangat kompleks karena tergolong kejahatan transnasional yang tidak hanya mencakup satu negara tetapi terkadang

melewati batas negara atau beberapa negara sehingga menjadi permasalahan internasional. Perdagangan perempuan tidak hanya meliputi satu kejahatan saja tetapi diikuti oleh beberapa kejahatan seperti prostitusi, pornografi, kekerasan/eksploitasi sosial, kerja paksa, dan perbudakan, dimana yang sering menjadi korban untuk kejahatan semacam ini adalah kebanyakan perempuan. Penanganan kejahatan ini pun sulit karena dilakukan secara sistematis dan berjejaring, sehingga dari sekian banyaknya kasus perdagangan perempuan hanya sedikit pelaku yang dapat diproses dan dijatuhi hukuman pidana.

Salah satu upaya pemberantasan perdagangan perempuan adalah diaturnya kejahatan perdagangan perempuan ini di dalam produk hukum. Di Indonesia ada beberapa produk hukum yang memberi pengaturan mengenai perdagangan perempuan, dari aturan hukum yang bersifat umum sampai aturan yang bersifat khusus yang spesifik mengatur mengenai perdagangan perempuan. Aturan hukum tersebut meliputi: Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.

Suatu peningkatan bahwa saat ini sudah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *trafficking* yang didalamnya tersirat mengatur mengenai perdagangan perempuan, dan sudah mulai berorientasi pada perlindungan korban. berorientasi kepada korban karena konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" (berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana). Namun dalam pembuatan suatu produk hukum pasti terdapat kelemahan maupun

kelebihan, begitu juga dengan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perdagangan perempuan. Sehingga perlu dikaji kelemahan dan kelebihan tersebut untuk perbaikan kedepannya, demi penyempurnaan aturan hukum dalam memberantas kejahatan perdagangan perempuan dan perlindungan terhadap korban yang diakibatkan kejahatan ini .



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) Di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, pengaturan mengenai perdagangan perempuan terdapat dalam Pasal 6 yang menyatakan, “Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan, untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran”. Menanggapi isi pasal tersebut Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran, salah satunya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diundangkan 19 April 2007.

Sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terbentuk ada peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai perdagangan perempuan yaitu Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak yang mengutip *Protocol Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, supplementing to the united Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir

Transnasional, tahun 2000, kemudian biasa disebut Palermo Protocol, yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada 12 Desember 2000) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun dalam Keppres, walaupun sudah memuat aturan yang jelas untuk mencegah perdagangan perempuan tetapi tidak mempunyai kekuatan menghukum seperti undang-undang sehingga masih berlaku secara terbatas. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak memberikan penjelasan dan pengaturan secara jelas dan spesifik mengenai perdagangan perempuan. Akhirnya pada tahun 2007 Indonesia pun telah memenuhi penyempurnaan aturan mengenai perdagangan orang tersebut melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang didalamnya juga mengatur mengenai perdagangan perempuan.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang lebih dikhususkan kepada perempuan dan anak. Sesuai dengan fokus pembicaraan dari penulisan hukum ini yang lebih fokus kepada perdagangan terhadap perempuan yaitu perempuan dewasa.

Dari Ketentuan umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap jenis kelamin atau usia tertentu tetapi dapat ditujukan kepada siapa saja hal ini dapat dilihat dari unsur orang dimana kata orang dapat tertuju kepada pria, perempuan, dewasa maupun anak-anak, sehingga dalam hal ini pengertian diatas juga berlaku bagi perempuan.

Pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berarti berkaitan dengan perdagangan perempuan, terdiri dari 4 golongan yaitu:

- a. Orang perseorangan;
- b. Korporasi;
- c. Penyelenggara negara ;dan
- d. Kelompok yang terorganisasi.

Orang perseorangan dan korporasi didefinisikan sebagai setiap orang oleh undang-undang ini, yang merupakan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang yang diatur pada Bab II dan Bab III Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mengenai korporasi terdapat pengecualian, dimana terdapat pasal yang juga mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu dari Pasal 13-Pasal 15. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara hanya diatur di dalam Pasal 8. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi diatur dalam Pasal 16.

Pidana pokok dari tindak pidana perdagangan perempuan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah pidana penjara, dan denda. Dimana pidana penjara paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama adalah seumur hidup (Pasal 7 ayat (2)). Sedangkan untuk pidana denda, paling sedikit adalah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pidana kurungan hanya sebagai pidana pengganti jika terpidana tidak mampu membayar denda dengan maksimal pidana selama 1 tahun (Pasal 25).

Perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya perdagangan perempuan ini diatur dalam BAB V tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bab V terdiri dari 13 Pasal yaitu dari Pasal 43 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal pemberian perlindungan terhadap korban termasuk didalamnya korban tindak pidana perdagangan perempuan tetap mendasar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maka berlaku ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun bila diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 maka berlaku ketentuan perlindungan saksi dan korban yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang memberikan jaminan perlindungan terhadap korban. Adanya perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara hak-hak fundamental pelaku dan hak-hak dan kepentingan korban. Maka konsep mengenai perlindungan terhadap korban harus jelas, dalam arti harus ditetapkan terlebih dahulu arah atau cakupan dari perlindungan yang dimaksud mulai dari lembaga atau

instansi yang berwenang memberikan perlindungan maupun bentuk-bentuk perlindungan yang akan diterima korban.

Bentuk perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus diatur dalam Bab V dan pengaturan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

a. Perlindungan untuk mendapatkan kerahasiaan identitas

Termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Bila dilihat pada redaksional pasal tersebut bahwa keluarga korban juga mendapatkan perlindungan maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengacu pada pengertian korban dalam arti luas yaitu yang tidak hanya menyangkut orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/ kelompoknya, tetapi juga termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban yang tidak mengalami penderitaan secara langsung.

b. Dibentuknya ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 45 yaitu:

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di

tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban, terutama bagi korban yang baru mengalami kejadian yang sangat buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan yang cenderung lebih sensitif, trauma dan mengalami gangguan psikis, maka mereka membutuhkan tempat untuk berlindung yang tidak membuat mereka takut dan tambah tertekan. Ini harus bermula dari kantor kepolisian setempat, karena kantor kepolisian biasanya menjadi tempat tujuan pertama setelah korban mengalami kejadian buruk akibat kejahatan perdagangan perempuan, dan disini juga tempat dilakukannya pemeriksaan yang pasti membutuhkan keterangan korban perdagangan perempuan.

c. Dibentuk pusat pelayanan terpadu

Ketentuan ini termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Pasal 46 ayat

- (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

2008, menyatakan bahwa hak yang bisa diperoleh saksi dan/atau korban oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah

- 1) Mendapatkan pelayanan dan penanganan secepat mungkin;
- 2) Mendapatkan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya;
- 3) Terjaganya kerahasiaan identitas; dan
- 4) Terjaminya keadilan dan kepastian hukum.

Ruang lingkup pelayanan bagi saksi dan korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, termasuk advokasi, konseling, dan bantuan hukum (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008). Pelayanan ini berlaku bagi saksi dan/atau korban yang berada diwilayah Indonesia (WNI maupun WNA) dan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia yang berada di luar negeri (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008). Dalam hal Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu dapat diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya, temannya, petugas kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial ke PPT langsung (Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008) atau aksi dan/atau korban melaporkan kepada kepolisian terdekat dan kemudian akan di periksa oleh kepolisian dan bila terbukti saksi dan/atau korban mengalami penderitaan akibat tindak pidana perdagangan perempuan, maka petugas Kepolisian yang melakukan pemeriksaan wajib membawa saksi dan/atau korban ke PPT terdekat (Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008).

- d. Mendapatkan perlindungan dari Kepolisian RI baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, bagi saksi dan/atau korban maupun keluarganya yang mendapatkan ancaman yang membahayakan

diri, jiwa, dan/atau hartanya (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

e. Restitusi

Diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007:

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 angka (6) korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sudah cukup baik dan itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya perlindungan korban tindak pidana perdagangan perempuan yang merupakan bagian tindak pidana perdagangan orang, tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, karena memang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya menentukan: “korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”. Ketentuan diatas tidak mengatur sanksi bila pelaku tidak memenuhi

tanggung jawabnya untuk membayar restitusi atau ganti kerugian kepada korban sehingga sifatnya tidak memaksa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah adanya ketentuan yang memaksa pelaku untuk membayar restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (4), dimana jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku akan dikenai pidana kurungan. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 telah mengalami kemajuan berarti terlebih yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban dibandingkan aturan sebelumnya (<http://www.unej.ac.id/index.php/berita/245-politik-hukum-pidana-perlindungan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang.html>).

f. Rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial

Selain restitusi korban tindak pidana perdagangan perempuan juga berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi, seperti yang diatur dalam Pasal 51- Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.

- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan perempuan kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban perdagangan perempuan. Kemudian hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Hal ini telah disesuaikan dengan kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan perempuan, dimana restitusi untuk mengganti kerugian

materiil yang mungkin dialami korban, dan rehabilitasi untuk mengganti kerugian inmateriil yang dialami korban. Seperti diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh korban perdagangan perempuan bisa berupa kerugian materiil maupun kerugian inmateriil (fisik maupun psikis). Yang bila diperinci dapat berupa:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil berupa kerugian secara ekonomi yang dialami oleh korban, misalnya kasus TKW illegal disebabkan karena terjadi perekrutan dengan penipuan, iming-iming pekerjaan dengan syarat membayar sejumlah uang, tetapi setelah membayar para korban dipekerjakan tanpa bayaran (perbudakan). Untuk kerugian materiil yang dialami korban perdagangan perempuan biasanya tidak berdiri sendiri tapi juga diikuti kerugian inmateriil.

b. Kerugian inmateriil

1) Kerugian fisik

Kerugian fisik terjadi karena adanya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan, mulai itu kekerasan karena penyiksaan yang menyebabkan luka badan maupun kekerasan seksual hingga bahkan menyebabkan matinya korban perdagangan perempuan.

2) Kerugian psikis

Kerugian psikis atau kerugian mental lebih kepada tekanan batin, trauma, malu dan stress akibat kejadian yang dialaminya, apalagi perempuan sebagai korban dari kejahatan perdagangan perempuan cenderung sensitif.

Adanya perbedaan kerugian yang mungkin dialami korban maka berbeda pula cara penanganan, bentuk bantuan dan perlindungan terhadapnya. Sehingga instansi atau lembaga yang berwenang memberi perlindungan dan bantuan harus lebih peka terhadap pemberian segala bentuk perlindungan dan bantuan.

Selain perlindungan diatas yang berhak diterima korban maka korban perdagangan perempuan juga berhak memperoleh hak-hak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaksanaan perlindungan yang termuat dalam UU PSK dilaksanakan oleh LPSK. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih menunjukkan bahwa fokus perlindungan ini lebih kepada korban yang sekaligus berkedudukan sebagai saksi. Selain hak-hak yang diberikan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-undang ini juga memberikan perlindungan berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, kompensasi dan juga restitusi, namun hak-hak ini khusus diberikan pada kejahatan HAM berat padahal bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, kejahatan perdagangan perempuan dikategorikan kejahatan biasa. Sehingga dalam hal ini dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hak-hak yang dapat diberikan kepada korban perdagangan perempuan hanya hak-hak yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan perlindungan mengenai restitusi dan rehabilitasi lebih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tepatnya dalam Pasal 48- Pasal 53.

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bila dilihat dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tindak pidana perdagangan perempuan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang dinyatakan Pasal 9 bahwa:

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau

sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan dan sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain, yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan apartheid.

Sepuluh (10) kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dinyatakan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), tindak pidana perdagangan perempuan masuk dalam kategori huruf c yaitu “Perbudakan” yang menurut Penjelasan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, “perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak dan Pasal 9 huruf g yaitu “Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan dan sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk lain yang setara”. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana perdagangan perempuan, karena yang menjadi korban utama dari kejahatan ini adalah perempuan. Dimana tindak pidana perdagangan perempuan ini pun merupakan kejahatan transnasional yang juga merupakan kejahatan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Kata serangan bila dirumuskan dari Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah suatu

rangkaian perbuatan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Sesuai dalam Pasal 38 kejahatan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang merupakan salah satu bentuk kejahatan perdagangan perempuan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. Kemudian dalam Pasal 40 untuk kejahatan kemanusiaan yang dimaksud huruf g dipidana penjara paling lama 20 tahun dan paling singkat 10 tahun. Undang-undang ini tidak mengatur mengenai pidana denda atau kurungan.

Mengenai perlindungan Korban dan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35, yang menyatakan bahwa

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun selain itu juga ada

perlindungan dalam bentuk pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.

Lebih lanjut Perlindungan korban dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak merupakan kutipan dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing to The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB melawan kejahatan terorganisir transnasional, tahun 2000). Keppres No. 88 Tahun 2002 ini terdiri dari 8 Pasal dan dilengkapi dengan 1 (satu) lampiran Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking)

Perempuan dan Anak. Delapan pasal tersebut berisi tentang Hakekat dan tujuan RAN-P3A (pasal 2), Pelaksanaan RAN-P3A (Pasal 3), Gugus Tugas RAN-P3A (Pasal 4-Pasal 5), dan Pembiayaan Gugus Tugas RAN-P3A (Pasal7).

Khusus untuk pengaturan perlindungan korban *women trafficking* dalam RAN tidak diatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Namun perlindungan korban *women trafficking* dapat ditemukan dalam rumusan tujuan dan sasaran RAN, yaitu mengenai adanya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban *women trafficking* agar dapat terjamin secara hukum. Selain itu dalam sasaran RAN juga termuat pengalokasian anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban. Kemudian adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial.

Hal ini menunjukkan RAN telah menganut pengertian korban dalam arti luas, dimana tidak hanya fokus kepada korban yang menderita secara langsung, tetapi juga telah memberikan perhatian kepada keluarga dan calon korban. Perlindungan korban dalam RAN ini tidak hanya sebatas pada pemberian kompensasi, rehabilitasi, restitusi tetapi lebih kepada pemulihan sosial dengan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan pelayanan sosial yang diharapkan akan lebih efektif.

B. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) Di Indonesia

1. Kelemahan

a. Ada 2 aturan yang saling tumpang tindih

Terdapat aturan perdagangan perempuan yang saling tumpang tindih, yaitu antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan yang saling tumpang tindih tersebut berkaitan dengan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus untuk kejahatan perdagangan perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, perdagangan perempuan yang merupakan kejahatan transnasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu “Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan dan sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk lain yang setara”. Bila berdasar pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 maka pengadilan yang berwenang untuk menangani kejahatan sebagaimana yang dirumuskan Pasal 9 huruf c dan huruf g adalah pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum.

Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus kejahatan perdagangan perempuan adalah pengadilan umum. Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, kejahatan perdagangan perempuan dikategorikan sebagai kejahatan biasa dan bukan merupakan kejahatan luar biasa seperti kejahatan kemanusiaan yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Keadaan semacam ini berpengaruh pada penanganan dan bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan. Seperti diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dikenal adanya kompensasi tetapi pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tidak, namun sebaliknya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenal

bentuk perlindungan reintegrasi (Pasal 51-Pasal 52) tetapi pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengaturnya.

Selain itu penanganan korban dari kejahatan-kejahatan luar biasa seperti kejahatan pelanggaran HAM berat lebih mendapatkan perhatian khusus atau istimewa daripada korban dari kejahatan biasa bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa:

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
- memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - mendapat penerjemah;
 - bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - mendapat identitas baru;
 - mendapatkan tempat kediaman baru;
 - memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

- bantuan medis; dan
- bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Dari Pasal 5 ayat (2) hak yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, dan yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu adalah antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kemudian hak yang termuat dalam Pasal 6 hanya di tujukan untuk korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 khususnya dalam huruf c dan huruf g bahwa perdagangan perempuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga korban perdagangan perempuan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Namun pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa kejahatan perdagangan perempuan hanya dikategorikan sebagai kejahatan biasa dengan demikian bila ditinjau dari segi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 korban perdagangan perempuan tidak akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 6 UU PSK.

- b. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, yang merupakan Ratifikasi dari Palermo Protokol, dan menjadi suatu panduan atau rencana untuk menghapus perdagangan orang sudah kadaluwarsa

Dalam pasal 3 Keppres No. 88 Tahun 2002 disebutkan bahwa “Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun”, seharusnya

pembaharuan tersebut dilakukan pada Tahun 2007 tetapi sudah 8 tahun sampai tahun 2010, RAN-P3A masih mendasar pada RAN-P3A yang lama yang temuat dalam Keppres No. 88 Tahun 2002. Dalam hal ini dibutuhkan pembaharuan terhadap RAN-P3A agar sesuai dengan kondisi saat ini, yang sudah berbeda dengan 8 tahun yang lalu, atau saat awal pembuatan Rencana Aksi Nasional Penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak.

Secara tertulis isi dari Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sudah sangat baik terutama bagi perdagangan perempuan, namun implikasinya belum maksimal dalam mewujudkan sasaran dari RAN-P3A. Seperti misalnya teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 2 (dua) protokol tentang perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, sampai saat ini belum ada realisasinya yaitu Protokol tentang pencegahan, pemberantasan dan menghukum perdagangan (trafiking) terhadap manusia, terutama perempuan dan anak; dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Sasaran lain yaitu adanya harmonisasi standar internasional berkaitan trafiking dalam hukum nasional melalui revisi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Keimigrasian dan Undang-undang Peradilan HAM. Hal ini pun belum terlaksana sampai sekarang, sehingga belum ada kesatuan dalam pengaturan perdagangan orang terutama perdagangan perempuan.

Diharapkan bahwa tidak hanya sekedar aturan yang tertulis saja yang bagus tetapi juga implementasi aturan yang tertulis tersebut juga dilaksanakan secara baik dan maksimal. Dengan kata lain *balance* antara

aturan dan pelaksanaanya, sehingga hasil yang dicapai dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan perlindungan terhadap korban diharapkan dapat maksimal dan berhasil.

- c. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban *women trafficking* belum mengakomodasi korban secara keseluruhan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur *women trafficking* lebih memfokuskan kepada korban yang juga menjadi saksi, sehingga peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang optimal bagi keseluruhan korban. Padahal seharusnya perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi dan perlindungan tersebut diperuntukkan bagi semua korban tanpa terkecuali, sehingga perlindungan terhadap korban bisa dilaksanakan secara optimal. Jadi disini terlihat bahwa yang dicari adalah pentingnya keterangan korban untuk dapat menjerat pelaku, bukan kerugian yang dialami oleh korban.

Padaahal konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif yaitu perlakuan terhadap individu dan /masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian dimana hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan (Rena Yulia, 2009:162), yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, "*Daad-Dader Strafrecht*" (berpusat pada perbuatan pidana) kepada paradigma baru, "*Daad-Dader-Victim Strafrecht*" (berpusat pada korban yang timbul akibat adanya perbuatan pidana). Paradigma baru ini memfokuskan pada pemulihan korban, bukan lagi hanya sekedar menghukum pelaku. Maka sudah seharusnya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban perdagangan perempuan lebih khusus memberikan

perlindungan kepada korban perdagangan perempuan, karena bagaimanapun juga korban adalah pihak yang paling menderita sebagai akibat dari suatu tindak kejahatan maka sudah seharusnya semua peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dilaksanakan secara maksimal dan dengan tujuan utama untuk melindungi korban secara keseluruhan.

- d. Instansi atau lembaga yang memberikan perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-Undang belum bertindak aktif.

Ada beberapa instansi atau lembaga yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengamanatkan pembentukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, dan ada juga Gugus Tugas RAN-P3A yang diamanatkan oleh Keppres Nomor 88 Tahun 2002. Semua Instansi atau Lembaga tersebut melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dengan syarat harus ada laporan/permohonan dulu dari korban. Sehingga dalam hal ini instansi atau lembaga tersebut lebih bersifat pasif, dan korbanlah yang harus aktif mencari perlindungan bagi dirinya sendiri. Hal tersebut berdampak pada keengganan para korban untuk meminta perlindungan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dikarenakan para korban takut bila prosesnya terlalu lama dan rumit, selain itu juga tidak sedikit dari korban perdagangan perempuan malu untuk meminta perlindungan kepada instansi atau lembaga yang berwenang, karena mungkin korban perdagangan perempuan merasa bahwa apa yang menimpa dirinya

merupakan aib yang tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Walaupun dalam upaya perlindungan nanti kerahasiaan korban sangat dijaga.

Begitu banyak lembaga yang diamanatkan undang-undang dalam penanganan dan pemberian perlindungan bagi korban kejahatan perdagangan perempuan membuat pelaksanaannya menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan karena lembag-lembaga atau instansi-instansi tersebut memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama, namun tugas dan kewenangan tersebut tidak diatur secara jelas dan terperinci dalam undang-undang yang mengatur masing-masing lembaga atau instansi tersebut. Salah satunya adalah LPSK, dimana tugas dan kewenangan LPSK tidak dijelaskan dalam satu Pasal secara spesifik tetapi, tugas dan kewengannya terserirat dan harus disimpulkan dari Pasal-Pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006.

2. Kelebihan

- a. Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai *trafficking* terkhususkan perdagangan perempuan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyempurnakan aturan-aturan yang lama.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sudah ada aturan-aturan yang mengatur mengenai perdagangan perempuan walaupun tidak secara spesifik, seperti di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aturan-aturan tersebut belum efektif untuk menangani perdagangan perempuan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini diharapkan menjadi acuan kepada semua pihak untuk lebih

memperhatikan masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini sebagai upaya hukum yang digunakan untuk mencegah dan menghukum pelaku maupun untuk memberantas perdagangan perempuan, dan diharapkan para penegak hukum khususnya hakim dapat menerapkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan, melindungi dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap korban tindak pidana perdagangan perempuan.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berorientasi kepada korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mempunyai kelebihan yaitu undang-undang ini menetapkan bahwa persetujuan korban perdagangan perempuan tidak akan menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, undang-undang ini juga sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan perempuan. Kepedulian terhadap nasib korban tumbuh begitu meyakinkan sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana perdagangan perempuan. Perkembangan perhatian terhadap korban perdagangan perempuan tersebut menunjukkan bahwa masalah korban tindak pidana perdagangan perempuan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang sudah seharusnya mendapat perhatian, sebab hak-hak korban kejahatan perdagangan perempuan sudah begitu lama terabaikan. Perlindungan terhadap korban sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga posisi korban perdagangan perempuan dalam undang-undang ini sangat diperhatikan. Hal tersebut sangat berdampak baik bagi para korban perdagangan perempuan karena sudah ada peraturan khusus yang didalamnya termuat

perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan. Sehingga para korban perdagangan perempuan merasa terlindungi dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberlakukan daya paksa kepada pelaku dalam hal pemberian restitusi kepada korban perdagangan perempuan.

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengupayakan adanya daya paksa untuk pelaku melakukan kewajibannya membayar restitusi kepada korban perdagangan perempuan. Daya paksa yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun”.

Berbeda dengan undang-undang yang berlaku sebelumnya yang didalamnya juga mengatur adanya restitusi, yang masih bersifat umum dan tidak memaksa jika pelaku tidak membayar restitusi, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam hal ini dan dapat membuat pelaku sewenang-wenang yang akhirnya tidak memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar restitusi pada korban atau keluarga. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang khusus mengatur mengenai perlindungan korban pun, yang mengatur mengenai restitusi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya menentukan: “korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”. Sehingga sifatnya juga masih umum dan tidak ada ketentuan yang sifatnya memaksa kepada si pelaku jika

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu “Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan” tersebut tidak dilaksanakan. Dengan demikian sudah ada kemajuan yang berarti terutama pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

- d. Adanya perhatian dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perdagangan perempuan.

Bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya dari praktek-praktek perdagangan perempuan dan bentuk eksploitasi lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A). RAN-P3A merupakan rencana aksi yang terpadu lintas program dan lintas pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. Dengan adanya Keppres tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia giat memerangi perbudakan modern (perdagangan perempuan) dengan langkah-langkah untuk mengatasi akar permasalahan yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang memarginalkan kaum perempuan.

Kerjasama antar unsur internal dalam negeri dan dengan negara lain serta lembaga internasional semakin meluas dan menguat, hal tersebut bertujuan untuk memerangi perdagangan perempuan yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi trafficking tercermin dengan turut

ditandatanganinya *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* pada tahun 1998. *Plan of Action* ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan (www.stoptrafiking.or.id). Perhatian khusus ditujukan untuk melindungi korban perdagangan perempuan, dan penindakan hukum yang lebih keras kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan agar menimbulkan efek jera. Berbagai upaya penyuluhan, kampanye dan peningkatan kepedulian masyarakat juga telah dilakukan untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan.

Dengan dibuatnya aturan-aturan yang mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan berbagai rencana dan kegiatan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Kejahatan ini pun telah menjadi perhatian internasional sehingga banyak aturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang mengikat dan berlaku secara internasional untuk menghadapi kejahatan transnasional ini yang melewati batas-batas negara.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Women Trafficking* di Indonesia

Pengaturan mengenai *trafficking* khususnya perdagangan perempuan secara nasional terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak yang mengutip *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan Anak sebagai tambahan atas Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, tahun 2000).

Pengaturan mengenai perdagangan perempuan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur mengenai perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dibuatnya undang-undang ini merupakan suatu bentuk kemajuan yang berarti karena sebelumnya belum ada undang-undang yang mengatur secara lengkap dan spesifik sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya diatur mengenai perdagangan perempuan.

Mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan dari beberapa aturan yang mengatur perdagangan perempuan hanya ditemui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu tercantum dalam Bab V Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah cukup baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya perlindungan korban tindak pidana perdagangan perempuan yang merupakan bagian tindak pidana perdagangan orang, tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Bentuk perlindungan terhadap korban yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah Restitusi, Rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sosial. Mengenai Restitusi diatur dalam Pasal 48- 50, restitusi ini adalah suatu bentuk perlindungan korban yang menunjukkan adanya tanggung jawab pelaku. Sedangkan mengenai rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial diatur dalam Pasal 51-53. Bentuk perlindungan tersebut telah cukup baik mengakomodasi kerugian yang mungkin dialami korban perdagangan perempuan, yaitu kerugian materiil dan immateriil.

2. Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Women Trafficking* Di Indonesia

Kelemahan dan kelebihan dalam pengaturan perdagangan perempuan di Indonesia yaitu:

a. Kelemahan

e. Ada 2 aturan yang saling tumpang tindih

Yaitu antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan yang saling tumpang tindih itu adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus untuk kejahatan perdagangan perempuan.

f. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak, yang merupakan Ratifikasi dari Palermo Protokol, dan menjadi suatu panduan

atau rencana untuk menghapus perdagangan orang termasuk didalamnya perdagangan perempuan sudah kadaluwarsa

- g. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan belum mengakomodasi korban secara keseluruhan.
- h. Instansi atau lembaga yang memberikan perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang belum bertindak aktif.

b. Kelebihan

- e. Adanya aturan yang bersifat khusus dan mulai terperinci yang mengatur mengenai *trafficking* yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyempurnakan aturan-aturan yang lama.
- f. Adanya perhatian dari pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama perdagangan perempuan, dengan dibuatnya aturan-aturan yang mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan berbagai rencana dan kegiatan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dengan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Kejahatan ini pun telah menjadi perhatian internasional sehingga banyak aturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang mengikat dan berlaku secara internasional untuk menghadapi kejahatan transnasional ini yang melewati batas-batas negara.
- g. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sudah lebih berorientasi kepada korban, dan melibatkan peran aktif dari pelaku yang menyangkut tanggung jawab pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya yang menimbulkan kerugian pada korban yaitu dalam hal restitusi, diatur dalam Pasal 48-50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

B. Saran

1. Mensinkronkan peraturan yang ada supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan, sehingga diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan tidak hanya fokus pada satu permasalahan saja pada saat membuat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang sudah ada sebelumnya dan permasalahan-permasalahan lain yang terkait yang dapat dijadikan referensi. Selain itu diharapkan adanya tindak lanjut dalam menyikapi segala aturan dan rencana atau kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak hanya menjadi sebuah kata-kata atau aturan saja.
2. Perlindungan dan bantuan yang selama ini hanya berorientasi kepada korban yang menjadi saksi, diharapkan di waktu yang akan datang dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada keseluruhan korban kejahatan tanpa terkecuali.
3. Kelemahan yang ada dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan hendaknya menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat undang-undang untuk lebih cermat dalam membuat peraturan, sehingga kelemahan yang ada pada saat ini tidak ditemukan lagi dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. *Perkembangan Masalah Tindak Pidana Trafiking Secara Nasional Dan Internasional*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18122/3/Chapter%20II.pdf>>[20 Juli 2010, pukul 20.15 WIB]
- Anis Hamim dan Fatimana Agustinanto. 2006. “Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan” dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Balianzahab. *Penelitian Hukum Normatif*. balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum/>[1 Nopember 2010, pukul 21.45 WIB]
- Dikdik M.Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Erna Dyah Kusumawati. 2005. “Penerapan Prinsip Global Dalam Hukum Nasional Untuk Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak” dalam *Majalah Hukum Yustisia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Arief Amrullah. 2009. *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. <http://www.unej.ac.id/index.php/berita/245-politik-hukum-pidana-perlindungan-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang.html>>[22 Juli 2010, pukul 21.12 WIB]
- Mira Kartawijaya. 2007. *Trafficking dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. www.stoptrafficking.or.id>[22 Juli 2010, pukul 21.12 WIB]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

R. Valentina Sagala. 2006. "Perdagangan Perempuan dan Anak dalam Pandangan Seorang Aktivis Perempuan" dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rytto Agha Yoefiagana. 2009. *Fenomena Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-Anak yang Terjadi di Antara Negara Indonesia dan Malaysia*. <http://forum.hukum-umm.info/index.php?topic=190.0>>[20 Juli 2010, pukul 20.26 WIB]

Soerjono Soekanto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Suryono Ekotama ST, Harum Pudjianto RS., dan Wiratama. 2001. *Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas Atmajaya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press